

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI
Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI ;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

B. Buku

- Arikunto, Suharsimi, 2010, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Gunawan, Imam, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, PT Bumi Aksara, Jakarta
- Guraba, Sakafa, 2020, *Relasi Fungsional Jaksa dan Oditur Militer*, dilihat 16 Oktober 2020, <http://yoursay.suara.com/news/2020/06/09/102002/relasi-fungsional-jaksa-dan-oditur-militer>
- Hakim, RN, 2020, *75 Tahun TNI, Kontras Soroti Mandeknya Reformasi Peradilan Militer* dilihat 05 Juli 2021, <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/06392871/75-tahun-tni-kontras-soroti-mandeknya-reformasi-peradilan-militer>
- Hamzah, Andi, 1985, *Hukum Pidana Politik*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hidayat, Rofiq, 2021, *Begini Pengaturan Perpres Pembentukan Struktur Jampidmil* dilihat 20 Februari 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt602f81946919f/begini-pengaturan-perpres-pembentukan-struktur-jampidmil>
- Hutajulu, RKP, 2014, *Yurisdiksi Peradilan Militer Sebagai Prakondisi Peradilan Umum Dalam Penegakkan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Umum*, Program Pascasarjana Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
- Mahfud, Mohammad, 1998, *Politik Hukum di Indonesia*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta
- Mulyana, Asep, 2020, *Hukum Pidana Militer Kontemporer*, Gramedia Widiasarana, Jakarta
- Prinst, Darwan, 2003, *Peradilan Militer*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Azas- Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung
- Raharjo, Satjipto, 2003, *Pendayaan Asas Hukum Oleh Legislatif – Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta
- Sudirdja, RP, 2020, *Satu Komando Penuntutan Untuk Sipil dan Militer*, dilihat 15 Agustus 2020 diunduh dari <http://komisi-kejaksaan.go.id/satu-komando-penuntutan-untuk-sipil-dan-militer>
- Suratman & Dillah, Phillips, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Taher, AP, 2018, *KPK Terganjil Peradilan Militer di Kasus Korupsi Heli AW101*, dilihat 10 Oktober 2020, <http://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/kpk-terganjal-peradilan-militer-di-kasus-korupsi-heli-aw101-cNxS>

Waluyo, Bambang, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta

Menpanrb, Humas, 2020, *Rapat Pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer* dilihat dari <http://www.menpan.go.id/site/berita-foto/rapat-pembentukan-jaksa-agung-muda-pidana-militer> diunduh tanggal 16 Juni 2020

C. Karya Ilmiah

Gunarto, Marcus Priyo, Alasan Penghapusan Pidana, Alasan Penghapusan Penuntutan dan Gugurnya Menjalani Pidana, *Makalah Pada Penelitian Hukum Pidana dan Kriminologi yang diselenggarakan atas kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana Dan Kriminologi Indonesia*, Yogyakarta, 2014.

D. Sumber Lainnya

<https://propublik.id/ruu-kejaksaan-bukan-mengelminasi-peran-penegak-hukum-lain/?amp> diunduh tanggal 2 Februari 2021

Eksha, Golda, 2018, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/154309/sinergi-kejaksaan-dan-tni-bukan-upaya-militer-campuri-penegakan-hukum> diunduh tanggal 05 April 2022

Kou, Yohanes Babtista, 2016, pendaftaran tanah secara sistematis terhadap tanah bekas adat di kecamatan Cibul Kabupaten Manggarai setelah berlakunya PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, <http://e-journal.uajy.ac.id/11059/3/2MIH02186.pdf>, diunduh tanggal 22 Juli 2022